

BAB 2

PEMBANGUNAN WILAYAH YANG TIDAK SEIMBANG
(UNEQUAL DEVELOPMENT OF REGIONS) SEBAGAI SALAH SATU
DAMPAK DARI PROSES MAKRO GLOBALISASI
(MACROPROCESS OF GLOBALIZATION)

2.1 Globalisasi

Munculnya arus migrasi pekerja migran ke Jepang tentunya berkaitan dengan perubahan di dalam kondisi politik ekonomi dunia yang biasanya disebut sebagai globalisasi. Demikian pula dengan eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran yang juga berkaitan dengan globalisasi terutama pada proses makro globalisasi (*macroprocess of globalization*), yaitu melalui pembangunan wilayah yang tidak merata (*unequal development regions*).

Globalisasi mengacu pada semua proses di mana semua orang di dunia ini terinkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal (*single world society*), yaitu masyarakat global (*global society*) yang berdomisili di kota global (*global cities*) yaitu kota di mana korporasi transnasional terkonsentrasi. David Held mengungkapkan bahwa globalisasi bukan proses tunggal maupun proses searah. Globalisasi dapat dinyatakan sebagai fenomena multi dimensional yang melibatkan banyak bidang dari aktivitas dan interaksi, termasuk hal-hal yang berkaitan secara ekonomi, politik, teknologi, militer, hukum, kebudayaan dan lingkungan (Croucher, 2004, hal.11).

Globalisasi berkaitan dengan sistem dunia (*world system*). Istilah sistem dunia (*world system*) pertama kali dikembangkan oleh Wallerstein pada tahun 1970an (Johnson, 2000, hal.348). Sistem dunia (*world system*) ialah sebuah konsep yang mengacu pada hubungan yang kompleks yang mengatur negara-negara ke dalam kegiatan ekonomi internasional yang berpengaruh atas distribusi kekayaan, kekuasaan, gengsi serta sumber daya untuk pembangunan di antara negara-negara tersebut. Dalam sistem dunia, terdapat terdapat tiga jenis negara, yaitu *core* adalah negara-negara industri kapitalis yang mengatur sebagian besar kekayaan dunia, militer, perangkat keras dan keahlian, produksi teknologi yang

produktif, dan sumber finansial, *peripheral* yang biasa juga disebut sebagai negara Dunia Ketiga (*Third World nations*) yang terdiri atas negara-negara relatif miskin yang hanya sedikit mengontrol sumber produktif untuk berkompetisi di dalam perekonomian kapitalis internasional, dan *semi peripheral* ialah negara-negara kelas menengah yang secara umum menjalankan proses industrialisasi dan menyediakan tenaga kerja ahli untuk negara-negara industri *core* (Johnson, 2000, hal.349). Sebagai hasilnya, negara-negara ini memiliki ketergantungan terhadap negara *core* berupa bantuan finansial untuk pembangunan pabrik, industri dan teknologi begitu pula serta pangsa pasar untuk memasarkan produk-produk utama mereka. Anthony Giddens memaparkan bahwa sistem dunia yang ada dewasa ini mencakup ekonomi kapitalis dunia, sistem informasi global, militer dunia dan sistem negara berbangsa tunggal (*nation-state system*) (Croucher, 2004, hal.11).

2.2 Proses Makro Globalisasi (*Macroprocess of Globalization*)

Globalisasi juga memiliki dinamika, seperti yang dipaparkan oleh Saskia Sassen. Dinamika yang disebut dengan dinamika globalisasi tersebut dihasilkan oleh dua perangkat konfigurasi yang muncul dari negara Dunia Pertama (*First World*) dan negara Dunia Ketiga (*Third World*) yang berkonvergen, yaitu kota global (*global city*) dan satu set dari *survival circuits*.

Kota global di negara Dunia Pertama memusatkan kegiatannya pada fungsi ekonomi global dan sumber daya. Aktivitas yang memiliki implikasi pada manajemen dan koordinasi terhadap ekonomi global telah berkembang, menghasilkan permintaan yang tinggi terhadap pekerja profesional dengan upah yang tinggi. Di sisi lain, keadaan seperti ini juga menyebabkan pula timbulnya permintaan terhadap pekerja dengan upah rendah yang akan mengisi kekosongan di bidang jasa. Dengan demikian, kota global menjadi tempat di mana pekerja migran perempuan dengan upah rendah dalam jumlah besar terinkorporasi ke dalam sektor ekonomi yang strategis baik secara langsung maupun tidak langsung (Wulansari, 2005, hal.7).

Sementara itu, saat kegiatan perekonomian negara-negara Dunia Ketiga yang berada pada bagian *periphery* di dalam sistem global berjuang mengatasi

hutang dan kemiskinan, mereka meningkatkan pendapatan melalui pengiriman pekerja migran perempuan. Melalui pekerjaan dan pembayaran mereka, para perempuan ini berkontribusi terhadap pendapatan bagi negara yang berhutang (Wulansari, 2005, hal.7)

Seperti yang telah dikemukakan oleh Sassen, penyebab bermigrasinya migran perempuan Asia terletak pada dua set konfigurasi dinamis dari globalisasi, di satu sisi, dinamika yang berkonvergen berada di kota global yang menyebabkan munculnya permintaan yang besar terhadap pekerja dengan upah rendah sedangkan di sisi lain memunculkan dinamika yang memobilisasi perempuan sebagai *survival circuits*, yaitu pekerja migran yang bisa “dijual” untuk mengisi permintaan pekerja di kota global. Dua dinamika ini muncul dari proses makro politik ekonomi global. Adanya proses ini menghasilkan perbedaan ekonomi antara negara Dunia Ketiga seperti Filipina, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Thailand dan Indonesia dengan negara Dunia Pertama seperti Amerika, Eropa dan Jepang. Dengan kata lain, saat negara Dunia Pertama semakin makmur atau kaya, maka keadaan sebaliknya dialami oleh negara Dunia Ketiga, yaitu semakin miskin (Wulansari, 2005, hal.7-8).

Politik ekonomi global dinyatakan oleh Sassen melalui dinamika yang datang bersamaan dengan munculnya permintaan yang besar dari kota global terhadap pekerja migran. Selain proses globalisasi ini mengakibatkan munculnya permintaan terhadap pekerja migran dalam jumlah besar, proses ini juga berhubungan dengan eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan Asia di negara Dunia Pertama (Wulansari, 2005, hal.15).

Argumentasi Sassen didukung pula dengan argumentasi yang disampaikan oleh Salazar Parrenas mengenai proses globalisasi, yaitu restrukturisasi global dan hubungannya dengan proses makro yaitu formasi blok ekonomi dari negara-negara postindustri, feminisasi buruh, pembangunan wilayah-wilayah yang tidak seimbang, berkembangnya komodifikasi kapitalisme dan perubahan nasionalisme ke arah sebaliknya (Parrenas, 2001, hal.24-25). Dalam studi ini, akan difokuskan pada salah satu aspek dari proses makro globalisasi (*macroprocess of globalization*), yaitu pembangunan wilayah yang tidak seimbang (*unequal*

development of regions) yang memiliki implikasi pada terjadinya eksklusi sosial terhadap pekerja migran perempuan Filipina di Jepang.

2.3 Pembangunan Wilayah yang Tidak Seimbang (*Unequal Development of Regions*) antara Jepang dan Filipina.

Pembangunan yang tidak merata dari politik ekonomi global (demografi, upah, struktur, harapan hidup dan kondisi sosial) antara negara maju dan negara lain di dunia, menurut sejarah serta secara struktural menyebabkan munculnya gelombang pekerja migran dari negara berkembang yang satu ke negara berkembang yang lainnya. Perbedaan pembangunan antara Jepang dan Filipina, tidak hanya berdasarkan upah tetapi juga berdasarkan tingkat demografi, harapan hidup dan keadaan sosial (Wulansari, 2009)

Ketidak seimbangan pembangunan yang terjadi antara negara Dunia Pertama (*First World*) dengan negara Dunia Ketiga (*Third World*) dapat ditinjau melalui dua aspek, yaitu bidang ekonomi dan bidang sosial.

2.3.1 Bidang Ekonomi

Ketidak seimbangan pembangunan di bidang yang terjadi antara Jepang dengan Filipina dapat dilihat melalui perbedaan jumlah GDP per kapita.

Tabel 2.1 Perbandingan GNI Jepang dan GNI Filipina Tahun 2007

	Jepang	Filipina
GNI Per Kapita (US\$)	34,750	1,620
Pertumbuhan GDP Per Tahun (%)	2,1	7,2
GDP (milyar US\$)	4,384.25	144.06

Sumber: *World Bank, world Development Indicators Database, April 2009*

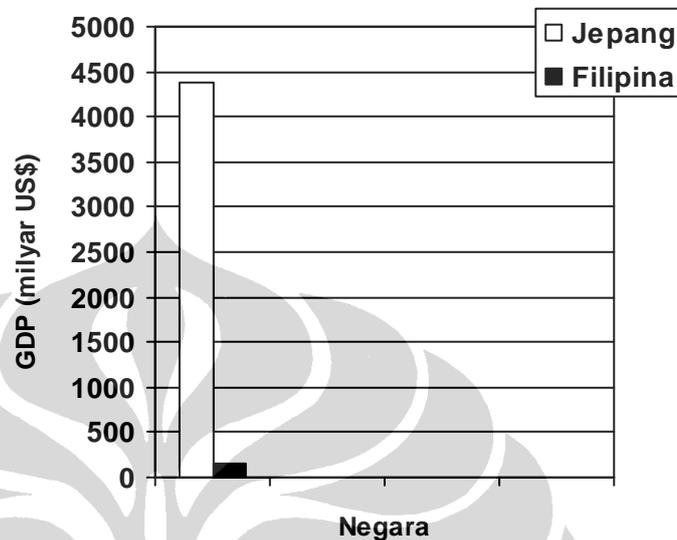
Pada tabel mengenai perbandingan Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Income*)¹ sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisa tingkat kekayaan suatu negara dan pertumbuhan ekonominya, dapat terlihat beberapa hal. Pertama, dari perbandingan GNI kedua negara didapati bahwa jumlah GNI Jepang jauh lebih besar melampaui jumlah GNI Filipina. GNI Jepang adalah 34,750 US\$ sedangkan GNI Filipina adalah 1,620 US\$. GNI Jepang hampir dua puluh kali lipat lebih besar dari GNI Filipina. Dengan demikian, Jepang memiliki pendapatan nasional yang lebih besar dari Filipina dan hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapatan (*wage differential*) dari kedua negara tersebut. Sebagai contohnya, pendapatan seorang pekerja migran perempuan di Jepang yang bekerja sebagai penghibur (*entertainer*) adalah 60.000 yen perbulan (29.903,63 peso) sedangkan jika ia bekerja sebagai pegawai hotel di Filipina, ia hanya mendapat 6.009,3 peso per bulan. Selanjutnya pekerja kontrak di luar negeri, upahnya adalah 200.000 yen per bulan (99.678,78 peso) sedangkan jika ia bekerja sebagai pegawai manufaktur, ia hanya mendapat 8.321,1 peso perbulan. Upah sebagai *caregiver* di Jepang adalah 150.483 yen per bulan (75.000 peso), sedangkan jika ia bekerja di bidang pendidikan, ia hanya menerima 13.672 peso. Dengan demikian, tergambarlah perbedaan upah dari kedua negara tersebut.

Kedua, pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*)² per tahun dari Filipina lebih besar dari pertumbuhan GDP Jepang. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Filipina lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun sebelumnya. Ekonomi Filipina tumbuh sebesar 7,2 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan ekonomi Jepang tumbuh 2,1 persen dari tahun sebelumnya. Ketiga, GDP Jepang memiliki jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dengan GDP Filipina. GDP Jepang adalah 4,384.25 milyar US\$ dan GDP Filipina adalah 144.06. Dapat dikatakan bahwa GDP Jepang tiga kali lipat dari GDP Filipina seperti yang tertera pada Grafik 2.1.

¹ GNI (*Gross National Income*) atau Pendapatan Nasional Bruto terdiri dari jumlah nilai total produksi dalam negeri dengan pendapatan yang didapatkan dari negara lain dikurangi pembayaran ke luar negeri.

² GDP (*Gross Domestic Product*) atau Produksi Domestik Bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi suatu negeri pada suatu periode (Mankiw, 2006,hal.6) GDP dapat mengukur total pendapatan maupun total pengeluaran perekonomian seperti barang dan jasa. Jadi GDP per orang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran rata-rata seseorang dalam perekonomian. GDP dapat pula disebut sebagai ukuran tunggal yang paling baik dari kesejahteraan (Mankiw, 2006, hal.19)

Grafik 2.1 Perbandingan GDP Jepang dengan Filipina Tahun 2007



Sumber: World Bank, world Development Indicators Database, April 2009

Dari grafik perbandingan GDP antara Jepang dengan Filipina, terlihat perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam bidang ekonomi yang begitu besar antara Jepang dan Filipina.

2.3.2 Bidang Sosial

Ketidak seimbangan pembangunan antara Jepang dan Filipina dari bidang sosial dapat dianalisa melalui perbandingan demografi dengan angka indeks pertumbuhan manusia (*Human Development Index*). Indikator dari demografi yang digunakan adalah jumlah populasi, persentase pertumbuhan penduduk per tahun, tingkat fertilitas, dan jumlah populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.2 Demografi Jepang dan Filipina

	Jepang	Filipina
Jumlah Populasi (Juta)	127,9	84,6
Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	-0,1	1,8
Tingkat Fertilitas (<i>Fertility Rate, Total Births per woman</i>)	1,3	3,5
Jumlah Populasi yang Hidup Di bawah Garis Kemiskinan (%)	...	36,8

Sumber: *United Nation Development Program, Human Development Report 2007/200*

Keterangan: 1. Tingkat fertilitas (*fertility rate*) adalah total jumlah kelahiran per perempuan.

2. (...) menggambarkan tiadanya populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar UNDP.

Tabel di atas menggambarkan perbandingan demografi antara Jepang dan Filipina yang dilihat dari beberapa tolak ukur, yaitu jumlah populasi, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat fertilitas dan jumlah populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jika melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah populasi Jepang lebih besar dibandingkan dengan jumlah populasi Filipina, tetapi Jepang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang kecil dibandingkan Filipina., yaitu -0,1 persen per tahunnya. Begitu pula dengan tingkat fertilitas Jepang yang lebih rendah daripada Filipina, sehingga implikasinya adalah rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk di Jepang jika dibandingkan dengan Filipina. Selanjutnya, Filipina memiliki persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 38,6 persen sedangkan Jepang tidak memiliki populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bukan berarti Jepang tidak memiliki populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan sama sekali, melainkan tidak memiliki populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar yang ditetapkan oleh UNDP.

Tabel 2.3 Indeks Pertumbuhan Manusia (*Human Development Index*)³
Jepang dan Filipina Tahun 2007

Tolak Ukur	Jepang	Filipina
Nilai Indeks Pertumbuhan Manusia (<i>Human Development Index Value</i>)	0,953	0,771
Peringkat Indeks Pertumbuhan Manusia (<i>HDI Rank</i>)	8	90

Sumber: *United Nation Development Program, Human Development Report 2007/2008*

Keterangan: Peringkat Indeks Pertumbuhan Manusia (*HDI Rank*) dari 177 negara.

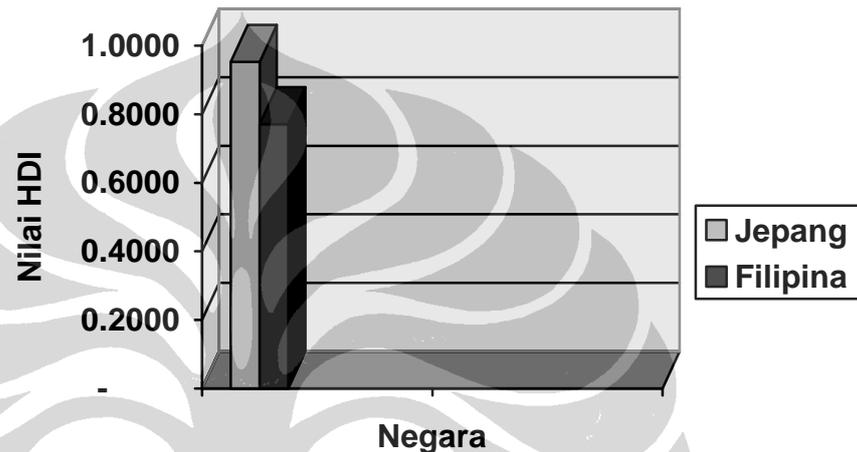
Human Development Index (HDI) atau Indeks Pertumbuhan Manusia digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan bagi suatu negara. Tabel di atas adalah tabel HDI untuk membandingkan HDI Jepang dengan Filipina melalui beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, tingkat penerimaan dalam pendidikan dasar, menengah dan tinggi dan yang terakhir adalah tingkat melek huruf bagi orang dewasa.

Tabel indeks pertumbuhan manusia di atas menjelaskan disparitas nilai indeks pertumbuhan manusia antara Jepang dengan Filipina pada tahun 2007. Pada tahun 2007, nilai indeks pertumbuhan manusia Jepang adalah sebesar 0,953 dan Filipina sebesar 0,771. Dari 177 negara di dunia, peringkat Jepang lebih tinggi jika dibandingkan dengan peringkat Filipina. Jepang menempati posisi delapan

³ Sejak tahun 1990, setiap tahunnya Laporan Pertumbuhan Manusia (*Human Development Report*) menerbitkan Indeks Pertumbuhan Manusia (*Human Development Index*) yang melihat GDP lebih dalam lagi untuk menjelaskan definisi yang lebih luas tentang kesejahteraan. Indeks Pertumbuhan Manusia (*Human Development Index*) tersusun atas tiga tolak ukur pertumbuhan manusia, yaitu hidup dengan umur panjang serta hidup yang sehat (diukur melalui angka harapan hidup), pendidikan (diukur melalui persentase manusia yang tidak buta huruf dan yang menempuh pendidikan dasar, menengah serta tinggi), dan yang terakhir adalah standar hidup yang layak (diukur melalui perolehan persamaan kekuasaan dan jumlah pendapatan) (UNDP)

sedangkan Filipina menempati posisi sembilan puluh. Gambaran disparitas ini akan lebih jelas jika melihat grafik nilai indeks pertumbuhan manusia.(Grafik 2.2).

Grafik 2.2 Nilai Indeks Pertumbuhan Manusia
(*Human Development Index Value*) Jepang dan Filipina
Tahun 2007



Sumber: *United Nation Development Program, Human Development Report 2007/2008*

Dengan demikian, melalui grafik nilai Indeks Pertumbuhan Manusia terdapat disparitas yang dialami oleh Jepang dan Filipina. Semakin besar nilai indeks pertumbuhan manusia suatu negara dan semakin kecil peringkatnya, maka tingkat kesejahteraan penduduknya semakin tinggi dan semakin maju. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks pertumbuhan manusia suatu negara, maka tingkat kesejahteraan penduduknya rendah dan kurang berkembang.

Selanjutnya, dalam melihat Indeks Pertumbuhan Manusia suatu negara, tidak bisa lepas pula dari indikatornya yang menggambarkan tingkat kesehatan dan pendidikan penduduknya. Tingkat kesehatan digambarkan melalui angka harapan hidup, tingkat pendidikan digambarkan melalui persentase tingkat penerimaan pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta persentase tingkat melek huruf seperti yang dapat dilihat pada tabel Indikator Indeks Pertumbuhan Manusia antara Jepang dengan Filipina tahun 2007 (Tabel 2.4)

Tabel 2.4 Indikator Indeks Pertumbuhan Manusia
Antara Jepang Dengan Filipina Tahun 2007

Indikator HDI	Jepang	Filipina
Angka Harapan Hidup dalam Kelahiran (<i>Life Expectancy at Birth</i>)	82,3 tahun	71,0 tahun
Tingkat Penerimaan Pada Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi (<i>Enrolment at the Primary, Secondary and Tertiary Level</i>)	85,9%	81,1%
Tingkat Melek Huruf (<i>Adult Literacy Rate</i>)	99%	92,6%

Sumber: *United Nation Development Program, Human Development Report 2007/2008*

Keterangan: Tingkat melek huruf (*adult literacy rate*) diperuntukkan bagi usia 15 tahun ke atas.

Pertama, pada perbandingan rata-rata angka harapan hidup Jepang dan Filipina, rata-rata angka harapan hidup penduduk Jepang adalah 82.3 tahun sementara rata-rata angka harapan hidup penduduk Filipina adalah 71 tahun. Jadi, Jepang memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Filipina.

Kedua, untuk mengukur tingkat pendidikan, digunakan indikator berupa tingkat penerimaan pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Melalui tolak ukur ini, terlihat bahwa kedua negara ini memiliki persentase yang tidak jauh berbeda yang menandakan baiknya tingkat pendidikan di kedua negara ini. Hal ini didukung pula oleh persentase tingkat melek huruf di Jepang dan Filipina yang keduanya memiliki persentase yang tidak jauh berbeda, diatas 90 persen dari penduduk ke dua negara ini melek huruf. Walau pun terdapat perbedaan di antara kedua negara ini, tapi perbedaannya tidak signifikan.

Sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Parrenas mengenai proses globalisasi yang akan digunakan untuk melihat eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan Filipina di Jepang, ialah melalui bagaimana pembangunan wilayah yang tidak merata saat globalisasi dapat menyebabkan timbulnya eksklusi sosial yang mereka alami. Dengan mengacu pada perbedaan yang muncul antara Jepang dengan Filipina baik di bidang ekonomi dan sosial,

maka tergambar akan adanya pembangunan wilayah yang tidak seimbang (*unequal development of regions*) antara Jepang dan Filipina. Selanjutnya, pembangunan wilayah yang tidak merata ini dapat digunakan sebagai aspek yang relevan untuk menjelaskan eksklusi sosial.

Di ruang politik globalisasi yaitu berkaitan dengan pembangunan wilayah yang tidak seimbang, termasuk ekonomi berbasis hierarki "*nation-based*" dan tingkat pendidikan membuat pekerja migran perempuan Asia berada di posisi yang tidak sama dengan orang yang mempekerjakan mereka di negara Dunia Pertama. Konsekuensi dari posisi yang tidak seimbang ini menghasilkan hubungan yang tidak seimbang atau ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja migran perempuan Asia dengan orang yang mempekerjakan mereka. Pada akhirnya, ketidakseimbangan ini menjadi sumber dari eksklusi sosial yang mereka alami (Parrenas, 2001, hal.151-152).

Eksklusi sosial ini mengindikasikan bahwa pekerja migran perempuan Asia menempati posisi dalam daerah transnasional. Pergantian status mereka saat berada di negara pengirim menjadi berada di negara penerima menegaskan posisi mereka dalam pasar buruh global (Wulansari, 2005, hal.16).

Mobilitas mereka yang pada awalnya mengalami keterbatasan bermobilisasi dalam pasar buruh di kalangan negara-negara Asia harus dibayar dengan eksklusi sosial yang didapatkan melalui pilihan terbatas dalam pasar buruh transnasional (keluar dari batas-batas negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hierarki dari kapitalisme global memberi kesempatan pada timbulnya hubungan yang tidak setara terhadap kekuasaan antara pekerja migran dengan orang yang mempekerjakan mereka. Ketidaksetaraan kekuasaan inilah yang pada akhirnya menjadi sumber dari makin buruknya eksklusi sosial yang dialami oleh para pekerja migran perempuan Asia (Wulansari, 2005, hal.17). Salah satu aspek dari proses makro globalisasi (*macroprocess of globalization*) terfokus pada pembangunan wilayah yang tidak seimbang (*unequal development of regions*) yang berdampak pada terjadinya eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan Filipina di Jepang. Namun demikian, sebelum masuk ke bagian analisa tentang eksklusi sosial, akan dibahas dahulu mengenai gambaran umum pekerja migran perempuan Filipina pada bab selanjutnya.